

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi pada prinsipnya adalah landasan suatu negara dalam menata sistem pemerintahan yang terus berproses menuju arah lebih baik. Demokrasi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia sering kali berhubungan dengan peran serta berbagai partai dengan ideologi yang ikut serta di dalamnya. Berbagai bentuk identitas etnik sering kali digunakan sebagai alat dalam berpolitik. Representasi politik dan peningkatan identitas politik otomatis ada sebagai wujud atau akibat adanya partisipasi peran politik yang ada sejak masa reformasi sampai saat ini (Wartika, 2020). Demokrasi saat ini berada pada posisi teratas yang digunakan banyak negara sebagai suatu sistem politik karena dianggap mampu dengan baik menyelesaikan dan mengatur hubungan politik dan sosial yang bersangkutan dengan kepentingan antarindividu dengan warga, warga dengan warga, warga dengan negara (Margianto, 2020).

Sebagai suatu bagian dalam politik, demokrasi adalah sebuah cara untuk memilih pemimpin dalam politik. Setiap masyarakat diberikan hak untuk menentukan pilihan dalam konstestasi untuk melahirkan seorang pemimpin. Sebagai negara yang menggunakan sistem politik demokrasi, Indonesia senantiasa berusaha menciptakan kehidupan yang demokratis di segala bidang. Pada Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar 1945 terkait kedudukan yang sama untuk seluruh warga negara dibanding dari sudut hukum, berkumpul, berserikat, mengeluarkan

pendapat, dan lainnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang lahir dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dari semua identitas etnis memiliki hak untuk dapat memilih dan dipilih pada pemilu yang demokratis.

Cita-cita demokrasi ditunjukkan melalui pemilu. Dengan kata lain, rakyat berpartisipasi aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik suatu bangsa selama lima tahun ke depan. Pemilihan umum (juga dikenal sebagai pemilu) sering disebut sebagai lambang dan standar demokrasi. Hasil dari prosedur dilakukan dalam suasana yang memungkinkan kebebasan berserikat dan berekspresi. Dengan demikian, hal ini dipandang cukup mencerminkan keterlibatan dan tujuan masyarakat. pemungutan suara sebagai cara untuk mengalami demokrasi. Jika perbandingannya adalah bahwa demokrasi tidak dapat eksis tanpa pemilu. Pemilu semata-mata sebagai metode memilih pimpinan legislatif dan eksekutif pusat dan daerah, bukan sebagai tujuan akhir itu sendiri.

Kemajuan suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari tujuan akhirnya. Untuk memperbaiki kehidupan semua warga negara dan memajukan sistem pendidikan negara, tujuan ini menjadi prioritas utama. Demokrasi dan pemilu sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Pemilu memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat. Karena itu membentuk satu kesatuan yang koheren dan memainkan peran penting dalam hasil pemilu. Sebab banyak terjadi masyarakat bingung dalam memahami calon kandidat, sehingga kelak dapat merugikan masyarakat. Dalam negara yang demokratis, setiap pemimpin terpilih melambungkan harapan dan impian rakyatnya, karenanya hak untuk memilih sangat penting bagi nasib negara.

Pemilu adalah instrumen demokrasi dalam membangun kekuasaan negara dengan permusyawaratan perwakilan rakyat dan kedaulatan rakyat yang berdasar pada Undang-Undang 1945. Kekuasaan dalam pemilu merupakan kedaulatan yang muncul dari keinginan rakyat dan digunakan berdasarkan keinginan rakyat dan sama halnya dengan pemilihan suatu pimpinan paling kecil sekalipun. Adanya pemilihan kepala daerah merupakan bentuk dalam memilih pemimpin, baik Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai pimpinan suatu daerah. Oleh sebabnya, segala kedaulatan rakyat tidak bisa terlepas dari pemilu karena pemilu adalah keniscayaan dalam prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, keyakinan dasar dalam kehidupan bernegara yang demokratis adalah bahwa setiap masyarakat berhak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perpolitikan yang ada (Hartoyo, 2019).

Dalam pemilihan kepala daerah tim sukses akan memainkan cara apa saja sesuai batasan demokrasi agar calonnya menang. Beberapa opsi terpilih seperti politik uang. Namun nyatanya kemenangan tidak bisa diandalkan hanya menggunakan uang. Selain uang, identitas etnik juga berperan besar. Sebagai makhluk sosial, manusia terprogram untuk membentuk ikatan satu sama lain. Interaksi ini tentunya menjadi hal yang terus menerus dilaksanakan setiap harinya dengan dinamika bervariasi pada ruang dan waktu yang berbeda. Beberapa pemicu interaksi biasanya didorong oleh kebutuhan ekonomis, biologis, emosional, dan identitas yang melekat pada individu tersebut. Setiap manusia pastinya memiliki identitas yang dapat memengaruhi politik pada masyarakat yang tampak jelas pada beberapa tahun belakangan.

Identitas adalah sebuah sarana paling mudah dalam mendapatkan pemilih. Hal tersebut seringkali dilakukan dengan manipulasi aspek kecintaan seseorang kepada suku, kelompok agama, rasial serta digunakan untuk mencari suara dalam pemilihan kepala daerah. *Framing* identitas dapat dikatakan suatu bentuk sikap yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam dunia politik dengan didasarkan identitas. Identitas dapat berupa ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Bahkan di kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya, politik identitas dapat terlihat dari segi agama, dimana agama digunakan sebagai politik identitas saat menunjukkan karakter diri demi memperoleh dukungan dari orang banyak karena didasarkan dengan dasar kesamaan agama.

Agama merupakan bentuk identitas yang menjadi instrumen dalam melakukan *framing* identitas. Di wilayah yang menjadikan agama termasuk menjadi urusan pemerintahan, sering kali kepercayaan atau agama dijadikan dasar kekuatan untuk intervensi kepada kelompok yang berbeda (Ibrahim, 2010). Perbedaan selalu terjadi di Indonesia. Perbedaan inilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang masyarakatnya memiliki bermacam identitas yang berbeda. Oleh karena itu, kesatuan dan ketunggalan bukan merupakan hal yang mutlak. Secara teori, *framing* identitas bisa diibaratkan pisau bermata dua di dalam negara Republik Indonesia ini, karena dapat berdampak negatif ataupun positif.

Selain itu, *framing* identitas banyak ditemui dengan membawa nama daerah masing-masing. Dengan menonjolkan isu “putra daerah” dari daerah asalnya. Hingga, *framing* identitas menjadikan suatu partai sebagai bentuk pencitraan individu tersebut. Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara

sangat tepat karena Indonesia merupakan suatu negara multikultural yang banyak etnis, suku, agama, ras, dan budaya. Pada tahun 2010 berdasarkan data BPS, di Indonesia terdaftar 1211 bahasa, dimana Bahasa Daerah berjumlah 1158, terdapat 1340 suku, dimana suku Jawa adalah yang paling besar dengan persentase 41 % dari jumlah populasi yang ada (Welianto, 2020).

Bourdieu (1984) dalam pandangannya mengatakan bahwa adanya bentuk dominasi praktik politik banyak menyentuh segala aspek. Tidak hanya secara ekonomi, namun turut pula di dominasi ras dan budaya, orientasi politik, dan peran perempuan dalam masyarakat. Area ini dimaksudkan sebagai wilayah yang dinamis dengan segala perjuangannya yang terjadi demi mendapat posisi tertentu. Bourdieu kembali melanjutkan, ekonomi hanyalah satu faktor di antara banyak faktor, termasuk masyarakat, simbol, dan budaya. Sedangkan dalam memaknai *framing* identitas, bahwa segala sesuatunya tidak terlepas dari sebuah identitas itu sendiri. Identitas merupakan suatu bentuk jati diri atau adanya pengakuan dari satu individu maupun kelompok atau golongan tertentu yang menjadi satu kesatuan hingga menyatu dan terlibat di dalamnya (Suparlan, 2004: 25) satu kesatuan di dalam suatu kelompok ataupun golongan tertentu, tentulah hal ini tidak terlepas karena adanya rasa kesamaan yaitu adanya sebuah identitas. Identitas ini terbagi atas beberapa banyak hal, tidak hanya pada satu bentuk saja. Contohnya berupa identitas gender, agama, suku, profesi, dan lain-lain. sehingga kesamaan-kesamaan inilah yang akhirnya membentuk sebuah kelompok identitas.

Framing merupakan sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu,

menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas atau peristiwa (Habibah, 2019). Konsep framing secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkapkan *the power of a communication text*. Framing pada dasarnya merujuk pada pemberitaan definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto, 2002).

Pendekatan *framing* dipakai untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Perbedaan *framing* suatu berita oleh setiap media, mengungkapkan siapa mengendalikan siapa lawan siapa, mana kawan mana lawan, mana patron mana klien. Kebijakan redaksional tersebut menjadi pedoman dan ukuran dalam menentukan kejadian yang patut diangkat serta dipilih untuk menjadi berita maupun komentar (Kartini, 2020).

Framing identitas adalah suatu penanda pola kegiatan politik yang lebih luas dan perwujudan terhadap ketidakadilan dari beberapa kelompok sosial tertentu (Heyes, 2007). Menurut Heller dikatakan sebagai suatu politik identitas disebabkan oleh suatu konsep serta bentuk aksi politik yang terlihat adalah perbedaannya (*difference*) sebagai bagian dari cakupan politik (Abdilah, 2002: 16). Di sisi lain, identitas dalam dunia politik berasal dari suatu institusi dominan yang mengakui dan mengelompokkan diri berdasarkan stereotip pada diri mereka (Castells, 1997). Castells lebih lanjut mengidentifikasi konstruksi identitas melalui 3 model yaitu:

Tabel. 1.1 Model Konstruksi Identitas

No	Model	Keterangan
1.	<i>Legitimizing</i> atau legitimasi identitas	Identitas yang dibangun oleh institusi (penguasa) yang dominan dalam kehidupan sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan melekatkan sebuah identitas tertentu pada seorang atau kelompok.
2.	<i>Resistance identity</i> atau resistensi identitas	Identitas yang dilekatkan oleh aktor sosial tertentu dimana pemberian identitas tersebut dilakukan dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi hingga memunculkan satu resistensi dan membentuk identitas baru yang berbeda dari kebanyakan anggota komunitas sosial yang lain. Konstruksi identitas ini kemudian dikatakan oleh Coulhoun sebagai politik identitas.
3.	<i>Project identity</i> atau proyek identitas	Konstruksi identitas pada model ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi tertentu dalam masyarakat.. hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan.

Sumber: <https://www.researchgate.net/publication/269102959/KonstruksiIdentitasKeagamaan/link//download>.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi mengakui 6 kepercayaan yang berlaku di Indonesia yaitu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Kong Hu Chu, dan Buddha agar termasuk pada Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) warga Negara Indonesia (Katjasungkana, 2019). Dengan beragamnya identitas yang dimiliki oleh individu dan menguatnya salah satu identitas itu menimbulkan kefanatikan. Namun, kefanatikan dalam satu atau lebih unsur identitas tersebut akan berdampak tidak baik, karena dapat menimbulkan rasa

kebencian dan berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat. Salah satu contoh dapat dilihat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, di mana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikalahkan hal-hal yang identitas dengan suku, agama, ras, dan antar golongan lainnya (Wardah, 2017).

Segregasi sosial muncul secara horizontal menjadikan munculnya banyak persepsi dalam benak masyarakat seperti: persepsi peneliti dan dia, serta mereka dan kita sehingga muncul anggapan adanya pembagian-pembagian pribadi atau golongan dalam masyarakat. Pemisahan terhadap budaya yang berbeda, eksklusivitas yang ekstrem, dan menyalahkan kelompok yang tidak sependapat merupakan contoh dari politik identitas yang merusak. Hal buruk yang dapat terjadi ke depannya adalah pemimpin tidak dinilai dari kinerjanya, tetapi dinilai dari latar belakangnya, golongan minoritas akan merasa terpinggirkan, kondisi politik akan terasa kaku dengan adanya tekanan dari pihak tertentu. Dalam kondisi demikian maka menjadi konfrontasi tersendiri bagaimana pemimpin dan calonnya bisa meyakinkan masyarakat bahwa keberagaman yang ada merupakan hal yang dapat digunakan dengan baik bukan sebaliknya.

Struktur sosial masyarakat Indonesia beragam. Ketika semua komponennya dipertimbangkan: suku, bahasa, budaya, dan agama, inilah yang ditemukan. Dengan kata lain, keberagaman adalah ciri sejati masyarakat Indonesia. Pendapat Hildred, di Indonesia terdapat banyak suku yaitu sejumlah 416 suku. Setiap suku memiliki budayanya sendiri dengan berbahasa sendiri yang terdiri hingga 250 bahasa bahkan lebih. Selain itu, hampir seluruh agama berada

di nusantara. Untuk menjaga wibawa dan kebesaran Indonesia, keanekaragaman hayati yang kaya ini perlu dilindungi (Zada, 2016).

Keberagaman dalam masyarakat Indonesia tidak hanya berdampak positif namun bisa juga berdampak negatif apabila tidak diciptakannya saling menghargai satu sama lain meskipun berbeda suku, etnis, agama, maupun ras. Karena keragaman ini, terjadi konflik dalam masyarakat, termasuk perselisihan antarsuku, antaragama, antarras, dan antarkelompok. Konflik dapat menyebabkan perpecahan atau disintegrasi masyarakat, perpecahan dalam norma dan nilai sosial yang diterima, dan penghancuran harta benda dan makhluk hidup. (Decequeen, 2022). Banyak kelompok etnis berbeda yang menyebut Medan sebagai rumah membuktikan keragaman kota. Medan terkenal karena keragamannya, yang merupakan salah satu ciri khasnya.

Meskipun demikian, Medan tercatat sebagai kota yang tidak memiliki satu pun ras atau budaya yang dominan (Bruner dalam Suparlan: 2005). Suku bangsa lain kini memiliki kebebasan untuk hidup dan berkunjung sesuai dengan budaya sukunya masing-masing sebagai akibat dari keadaan tersebut. Kota Medan adalah representasi dari kota metropolis multietnis, dan sejarah serta signifikansi budayanya yang sebenarnya tidak dapat disangkal. Fakta ini benar-benar berkembang menjadi sumber modal sosial yang potensial bagi kota ini. Sehingga tidak hanya dilihat dari sudut pandang negatif saja. Untuk itu, proses pembangunan sebuah kota, dibutuhkan calon pemimpin yang mampu melihat realitas yang ada, salah satunya melalui pemilu. Adanya kehadiran suatu suku

menjadi sebuah potensi yang dapat dijadikan sumber bagi calon pemimpin nantinya untuk memperoleh dukungan pada saat pemilihan.

Menurut penelitian yang telah dilaksanakan oleh Antropolog Amerika yaitu Bruner, di Kota Medan tidak ada budaya dominan. Dikatakan demikian sebab seluruh suku memiliki ciri khas dan keunggulan masing-masing. Hal ini terlihat dari cara-cara khusus yang dipilih oleh masing-masing kelompok masyarakat adat untuk hidup dan bekerja. Keberagaman ini pada akhirnya berkontribusi pada reputasi kota Medan sebagai kota metropolitan multietnis dan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Kota Jakarta dan Kota Surabaya. Kenyataannya, karena keragaman tersebut Kota Medan menjadi contoh mikrokosmos Bangsa Indonesia (Edward M. Bruner dalam Pelly, 1994).

Menurut Pelly (1994), pola permukiman di kota Medan terdiri dari kumpulan tempat tinggal yang menunjukkan desa-desa yang jaraknya berjauhan secara seragam. Hubungan sosial tradisional dan hiburan kelompok etnis dari kampung halaman mereka akan dilestarikan dalam kelompok permukiman ini. Sejak awal abad ke-20, permukiman yang berorientasi etnis telah menjadi simbol Kota Medan. Sebagai contoh, masyarakat Minangkabau dan Tionghoa seringkali tinggal dekat dengan kawasan komersial di pusat kota. Pinggiran kota adalah di mana Anda dapat menemukan Toba dan Mandailing. Sebaliknya, orang Melayu mendominasi petak-petak tanah yang luas dan tinggal di sejumlah besar tempat tinggal perkotaan, khususnya di tempat-tempat seperti Kota Matsum, Kampung Masjid, Sei Rengas, Sei Agul, dan Petisah. Namun, karena orang Melayu tidak memiliki peran penting dalam industri dan pemerintahan, mereka mulai

meninggalkan kota tersebut setelah kemerdekaan karena sebagian besar tanah dan rumah mereka telah dijual kepada orang asing. (Pelly, 1994). Masyarakat Kota Medan cukup beragam dari segi geografi dan demografi. Kota Medan merupakan rumah bagi beberapa suku bangsa yang banyak di antaranya hidup berdampingan di sana. Keanekaragaman adalah indikator yang menunjukkan bahwa sebuah kota multietnis ketika hadir. Pada saat yang sama, keragaman merupakan sumber potensial modal sosial yang dapat membantu kawasan ini berkembang. Menunjukkan realitas keragaman demografis Indonesia merupakan gambaran keragaman yang ada di Kota Medan.

Selain itu, *framing* identitas juga turut mengancam harmonisasi kehidupan masyarakat plural di Kota Medan. Melalui pantauan lima media lokal, Aliansi Sumatera Utara Bersatu (ASB) mendokumentasikan sejumlah peristiwa terkait intoleransi. Pada tahun 2011, sebanyak 63 kejadian dilaporkan, dan pada tahun 2012 sebanyak 75 kasus. Kasus intoleransi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk perilaku diskriminatif, komentar yang meremehkan kehidupan beragama, tuntutan yang dilakukan oleh kelompok besar terhadap pemerintah, upaya lokalisasi, penggusuran, masalah rumah ibadah, adanya penistaan terhadap suatu umat, dan penyalahgunaan simbol-simbol yang dimiliki oleh agama tertentu, dan tindak kekerasan kepada para pemuka agama. Selain keragaman tersebut di atas, Kota Medan masih dalam tahap plural dan belum bertransisi ke tahap multikulturalisme.

Salah satu catatan penting dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Medan tahun 2020, dimana hasil Pilkada langsung di Kota Medan menunjukkan fenomena

framing identitas kesukuan dan agama. Menurut Akhir Matua Harahap, tabel berikut menggambarkan persebaran etnis dan komposisi demografis Sumatera Utara dan Kota Medan khususnya berdasarkan temuan sensus tahun 2010.

Tabel 1.2 Distribusi Etnik Sumatera Utara dan Kota Medan Tahun 2010

Distribusi Etnik di Sumatera Utara dan Kota Medan Tahun 2010		
Suku Bangsa	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan
Jawa	33.47	33.19
Toba	20.83	17.12
Angkola-Mandailing	13.54	10.16
Karo	5.49	4.62
Dairi	0.78	0.42
Simalungun	2.50	1.41
Melayu	5.8	6.86
Nias	7.01	1.10
Minangkabau	2.61	7.83
China	2.63	9.47
Aceh	0.95	2.70
Banjar	0.99	0.47
Others	3.40	4.65
Total	100.00	100.00

Sumber: *Data Olahan Sensus Tahun 2010, oleh Akhir Matua Harahap (2016)*

Selanjutnya, menurut catatan demografi, Kota Medan memiliki karakter pada tempat-tempat tertentu berpenduduk mayoritas beragama Islam namun pada tempat yang lain justru penduduk yang beragama Kristen. Hal tersebut terlihat dari data berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Medan

Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu	Jumlah
1,422,237	425,253	37,552	9,296	184,807	370	2,097,610

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2020*

Sebelumnya perlu dijelaskan latar belakang pasangan calon pada pemilihan Kepala Daerah Kota Medan tahun 2020 diikuti oleh dua pasang calon.

Pertama adalah Akhyar Nasution-Salman Alfarisi sebagai pasangan Mandailing-Minangkabau dan Islam, sementara pasangan kedua adalah Bobby Afif Nasution dan Aulia Rachman sebagai pasangan Mandailing-Jawa dan Islam. Selain itu Bobby Afif Nasution merupakan menantu dari Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat saat ini yaitu Joko Widodo. Fenomena kemenangan pasangan Bobby Afif Nasution dan Aulia Rachman lebih dominan menggunakan politik kesukuan. Bobby Nasution menggunakan kelompok-kelompok paguyuban sosial untuk menarik suara agar menang pada kontestasi Pilkada. Secara umum, kelompok-kelompok paguyuban lebih kuat solidaritasnya dan secara mudah mampu dimobilisasi untuk menentukan pilihannya kepada salah satu calon. Misalnya, penelitian yang pernah dilakukan oleh Adlin (2016) tingkat kesetiaan etnis yang tinggi dan fakta bahwa etnis sangat memengaruhi partai politik di Indonesia. Loyalitas pemilih terhadap calon pemimpin yang akan dipilih berdasarkan suku bangsa merupakan faktor yang signifikan dalam pemilihan mereka. Kesalahpahaman tentang politik Indonesia dapat terjadi akibat kegagalan untuk menjelaskan pentingnya loyalitas etnis di negara ini. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, kemenangan Bobby Afif Nasution dan Aulia Rachman sebesar 393.327 suara atau 53,45 persen dari suara sah. Setidaknya partisipasi ini didukung oleh kelompok-kelompok paguyuban. Kemenangan Bobby Afif Nasution sesungguhnya sesuatu yang biasa saja karena Kota Medan merupakan kota multikultural yang besar.

Namun karena pola kampanye yang berupaya menghidupkan sentimen etnis, menjadikan Pilkada Kota Medan tahun 2020 tidak terlepas dari Pilkada

yang menampilkan *framing* identitas itu sendiri. Sementara di pasangan Akhyar Nasution–Salman Alfarisi lebih menekankan pada *framing* identitas agama. Akhyar Nasution menggunakan kaum agama dan mendatangkan ulama nasional untuk mendeklarasikan kemenangan dan dukungannya. Tolak ukur dari Akhyar Nasution dengan mendatangkan ulama nasional adalah untuk memperoleh suara. 342.580 surat suara atau 46,55% dari total suara sah yang diberikan untuk Akhyar Nasution-Salman Alfarisi, menurut informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan. Organisasi keagamaan mendorong keterlibatan ini. Dengan demikian, 748.882 pemilih yang menggunakan hak pilihnya telah dihitung dalam hasil rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan. Dari total 1.635.864 pemilih, 886.964 penduduk (atau 54,22 persen) tidak menggunakan hak pilihnya.

Dinamika kampanye Bobby Afif Nasution seperti didesain sebagai tokoh yang sangat dekat dengan kelompok paguyuban bahkan juga memanfaatkan aktor elite nasional. Terdapat banyak kelompok paguyuban yang diajak sebagai bagian dari kampanye mereka seperti Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM3), Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP), Ikatan Keluarga Saiyo Minang (IKMS), Aceh Sepakat, Pasundan, Paguyuban Marga Tionghoa, Horas Bangso Batak, Pujakusuma, dan Lain-lain. Bahkan ada elite nasional yang ikut mempromosikan Bobby Afif Nasution yaitu Fahri Hamzah, Rocky Gerung, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, Adian Napitupulu dan masih banyak lagi. Sementara itu kampanye yang dilakukan Akhyar Nasution–Salman Alfarisi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pasangan sebelumnya.

Terdapat banyaknya dukungan berasal dari kaum agama yang diajak sebagai bagian dari kampanye mereka seperti Ustaz Hafifuddin Akbar selaku Koordinator Wasilah Ulama Medan Utara, Forum Ustaz Muda Kota Medan, Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Sumatera Utara, dan, Ustaz Abdul Somad. Selain itu, biaya listrik di tempat ibadah digratiskan jika Akhyar terpilih sebagai Walikota Medan, cukup mengindikasikan bahwa *framing* identitas sedang dijalankan. Dengan maraknya persoalan politisasi agama dan etnisitas, prosesi pemilihan Walikota Medan memunculkan semangat identifikasi berupa etnisitas dan agama ke permukaan. Ketegangan etnis dan agama berada di garis depan wacana kontemporer.

Hal ini terbukti dengan terpilihnya Bobby Afif Nasution dan Aulia Rachman dianggap ada memainkan *framing* identitas dalam kemenangan pemilu. Namun, ada beberapa hal yang dikhawatirkan sebagai contoh pasca saat pelaksanaan Pilgub DKI 2017 sangat terasa sekali sikap intoleran dari politisasi agama tadi. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana peran *framing* identitas dalam kontestasi Pilwakot Medan 2020 dan apakah *framing* identitas berjalan dalam kemenangan pemilu maupun untuk harmonisasi masyarakat plural di Kota Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang, pertanyaan penelitian inti studi dapat dinyatakan:

1. Bagaimana bentuk *framing* identitas dalam kontestasi Pilwakot Medan 2020?

2. Bagaimana framing identitas berjalan dalam pemenangan pemilu maupun untuk harmonisasi masyarakat plural di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisa bentuk *framing* identitas dalam kontestasi Pilwakot Medan 2020
2. Mengetahui dan menganalisa *framing* identitas berjalan dalam pemenangan pemilu maupun untuk harmonisasi masyarakat plural di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Politisi di negara ini sering menggunakan masalah identitas untuk mendiskreditkan lawan mereka. Kepribadian berkembang sejak lahir. Ia akan membawa identitas orang Jawa, karena ayah dan ibunya berasal dari daerah itu. Ketika seorang pria memiliki ayah Tionghoa dan ibu Tionghoa, pria tersebut lahir dalam kelompok etnis Tionghoa, dan ketika seorang pria memiliki ayah Muslim dan ibu Muslim, pria tersebut lahir dalam keyakinan Muslim. Demikian pula, jika dia lahir dari ibu Kristen dan ayah non-Kristen, dia akan mewarisi identitas ibu Kristennya. Oleh karena itu, yang kita maksud ketika kita berbicara tentang "identitas" sesuatu adalah sifat kunci yang berfungsi sebagai dasar untuk pengenalan benda itu. Ini adalah penjelasan yang bagus dan langsung tentang siapa kita. Temuan dari penelitian ini berdampak pada bagaimana masyarakat mengevaluasi dan memilih pasangan kandidat politik, dan bagaimana masyarakat tersebut mendorong dan memfasilitasi lebih banyak keterlibatan pemilih dalam

proses seleksi kepemimpinan. Sehingga berdampak pada kualitas demokrasi pada saat pemilihan umum. Selain itu, penelitian memberikan kontribusi bagi terciptanya kewaspadaan masyarakat terutama di Kota Medan agar tidak terpengaruh dengan yang namanya *framing* identitas, sehingga tidak menjurus kepada masyarakat luas.

